

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH GRATIS

A. Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Gratis

1. Pengertian Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Gratis

a. Sistem

Kata “sistem” mempunyai arti: metode/cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu); susunan cara.¹ Artinya, “sistem” bisa diberikan terhadap suatu perangkat/mechanisme yang terdiri dari bagian-bagian di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling memperkuat.

Pengertian lainnya yang umum dipahami di kalangan awam adalah sistem itu merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu di mana dalam penggunaannya bergantung kepada berbagai faktor yang erat hubungannya dengan usaha pencapaian tujuan tersebut.²

Dengan demikian penulis dapat mendefinisikan bahwa sistem adalah suatu sarana atau komponen yang saling berkaitan dan berkesinambungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

b. Pengelolaan Keuangan

Dalam *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, Husaini Usman menjelaskan, bahwa pengelolaan sama artinya dengan manajemen yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti “tangan” dan *agere* yang berarti “melakukan”. Kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya *management*

¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm., 712

² Muzayyin Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm., 245.

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.³

Husaini Usman juga mengutip dari pendapat Parker bahwa manajemen/pengelolaan ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*).⁴

Sedangkan Sufyarma mengutip dari Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁵

Heidjrachman Ranupandojo juga mengutip beberapa definisi manajemen, antara lain dari George Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Dalam kutipannya, L.A. Apply mendefinisikan manajemen adalah keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.⁶

Ibrahim Ishmat Mutowi' mengutip dari Haughton, bahwa manajemen adalah :

إِنَّ الْأَدَارَةَ هِيَ إِلَّا صِطْلَاحُ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى التَّوْجِيهِ
وَالرَّقَابَةِ وَدَفْعِ الْقَوَى الْعَامِلَةِ إِلَى الْعَمَلِ فِي الْمُنْشَأَةِ

Manajemen menurut istilah adalah suatu aktivitas yang mengakibatkan pengarahan, pengawasan, dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam organisasi.⁷

Sedangkan keuangan adalah berasal dari kata “uang” yang memiliki arti alat tukar/standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah: harta, kekayaan⁸ yang mendapatkan imbuhan ke-an mempunyai arti sifat: dana, biaya.

³ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm, 3.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Sufyarma, *Kapita Selektta Manajemen Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2003), Cet. 1, hlm. 188-189.

⁶ Heidjrachman Ranupandojo, *Teori dan Konsep Manajemen*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 1996), Cet 2, hlm, 41.

⁷ Ibrahim Ishmat Mutowi', *Al-Ushul al Idariyah li al Tarbiyah*, (Riyad: Dar al Syuruq, 1996), hlm, 13

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1232-1233.

Jadi bila dalam arti sempit, pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tata pembukuan. Sedang dalam arti luas mengandung arti pengurusan dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana, baik individu maupun lembaga.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan/manajemen keuangan adalah sebuah proses pengurusan yang bersangkutan dengan pendanaan/anggaran yang melibatkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, pengendalian dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien melalui usaha orang lain

c. Sekolah Gratis

Sekolah adalah merupakan sosok dari sebuah organisasi pendidikan yang melaksanakan kegiatan yang dikelola secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.¹⁰ Sedangkan gratis artinya adalah Cuma-Cuma; tidak dengan bayaran; bebas bea.¹¹

Jadi sekolah gratis adalah seperti yang dikutip oleh Hamid Hasan dari kamus besar bahasa Indonesia bahwa sekolah gratis/pendidikan gratis adalah pendidikan yang tidak dipungut biaya apa pun.¹²

Definisi di atas mengandung makna bahwa sekolah gratis adalah lembaga pendidikan yang mana dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya tanpa adanya pungutan biaya apapun dengan kata lain bebas dari biaya apapun (*free*).

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Penggunaan anggaran dan keuangan dari sumber manapun, apakah dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-

⁹ M. Sulthon Masyhud, dkk, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), Cet 2, hlm, 187.

¹⁰ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung; Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, 2003), hlm, 16.

¹¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Op.Cit*, 206.

¹² Hamid Hasan, "Ubah Definisi Sekolah Gratis", <http://www.mailarchive.com/cikeas@yahoogroups.com/msg20514.html>, hlm, 1.

prinsip umum pengelolaan keuangan, seperti apa yang disebutkan oleh M. Sulthon Masyhud, dkk, adalah sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan/teknis yang disyaratkan
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan
- c. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya
- d. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.¹³

Dengan penjelasan prinsip-prinsip tersebut, penulis dapat menggaris bawahi, bahwa dalam pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien perlu adanya penyesuaian kebutuhan sekolah agar tidak terjadi pemborosan, pengelolaan yang baik sesuai dengan aturan yang telah disepakati, dan transparansi terhadap semua pihak-pihak yang terkait terutama terhadap para donasi agar para pihak-pihak yang terkait lebih percaya lebih-lebih pada para donasi, serta sebisa mungkin lembaga pendidikan mengembangkan dana yang telah dipercayakan.

3. Pengelolaan Keuangan

Sekolah merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil. Kebutuhan akan masukan dan keluaran merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dari ketergantungan sekolah terhadap masyarakat dan lingkungannya. Masukan terhadap sistem sekolah mencakup lunak, keras, dan manusia yang selaras dengan perkembangan lingkungan terhadap keluaran.¹⁴

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan

¹³ M. Sulthon Masyhud, dkk., *Op.Cit*, hlm, 187.

¹⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cet 7, hlm. 172.

pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilaksanakan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang terciptanya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana, apa lagi dalam kondisi kritis seperti sekarang ini.¹⁵

Tentunya dalam menunjang pendidikan yang bermutu tentunya tidak lepas dari pendanaan atau sumber-sumber dana yang perlu didapatkan. Maka M. Nurdin Matry menambahkan, bahwa sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

- a. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan: hal ini sangat tergantung dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUA-PPA) dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, berapa yang dialokasikan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan berapa yang dialokasikan ke sekolah.

¹⁵ M. Nurdin Matry, *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*. (Makassar: Aksara Madani, 2008), hlm. 171.

- b. Orang tua atau peserta didik
- c. Masyarakat, baik yang mengikat ataupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 bahwa, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.¹⁶

Senada dengan apa yang dikutip oleh Mujamil Qomar dari E. Mulyasa, bahwa sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara gratis dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber seperti yang telah disebutkan di atas.¹⁷

Oleh sebab itu pandangan penulis, mengenai sumber anggaran pendidikan tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah atau masyarakat. Karena sesuai aturannya, bahwa pemenuhan kebutuhan dana pendidikan ditanggung bersama oleh semua pihak baik, pemerintah masyarakat, orang tua. Hal itu agar amanat UUD 1945 tentang hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

4. Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Gratis

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan perencanaan, implementasi, dan pengawasan keuangan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah kegiatan dan bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di

¹⁶ *Ibid*, 172.

¹⁷ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam*, (Malang: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm, 166.

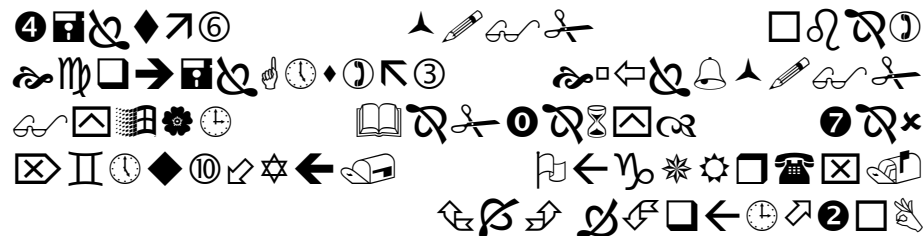
samping sebagai sebuah kebutuhan segala sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam suatu Hadis, Rasulullah SAW. bersabda,

إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فامض وإن كان شرا فانته (رواه ابن المبارك)

Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. (HR Ibnu Mubarak).¹⁸

E. Mulyasa juga menjelaskan, bahwa perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau *budget*, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.¹⁹

Sesuai dengan firman Allah,



Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS. Ash-shof. 4).²⁰

Firman Allah di atas menunjukkan bahwa pentingnya sebuah susunan suatu organisasi. Oleh karena itu dalam menyusun rencana

¹⁸ Didin Nafidhuddin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet 1, hlm, 77.

¹⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Op.Cit*, Cet 7, hlm, 173.

²⁰ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2004), Cet 73, hlm, 826.

harus disusun dengan rapi dan teratur yang sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Sedangkan fungsi perencanaan dalam bidang keuangan khususnya dana dari APBN dilakukan dengan cara pengisian data kebutuhan keuangan selaku bahan pembuatan usul kebijakan angsuran yang akan diajukan kepada instansi yang berwenang, sedangkan dana-dana lainnya ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang disusun bersama-sama antara pimpinan sekolah dengan pengurus komite sekolah.²¹

Adapun perencanaan keuangan sekolah setidaknya mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). Kedua kegiatan pokok tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Penyusunan RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah suatu hal yang penting keberadaannya dalam aplikasi fungsi perencanaan dalam manajemen keuangan di sekolah. Suatu tuntutan manajemen pendidikan modern bahwa lembaga pendidikan formal memiliki Rencana Anggaran setiap tahun baik berupa rencana pendapatan/penerimaan, maupun rencana belanja/pengeluaran, sehingga program kegiatan di sekolah disusun dengan memperhatikan unsur pembiayaan, agar program kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Program kegiatan sekolah dan sumber pendapatan untuk membiayai program itu, merupakan suatu sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang disebut dengan Program Budgeting Sistem (PBS).²²

²¹ M. Nurdin Matry, *Op.Cit*, hlm. 174-175.

²² *Ibid.*,

Penyusunan anggaran sekolah atau sering disebut anggaran belanja sekolah (ABS), biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi:

- a) Sumber pendapatan terdiri dari UYHD, DPP, OPF, dan lain-lain.
- b) Pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan alat-alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.²³

Sedangkan untuk menyusun anggaran sekolah tentu saja membutuhkan pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran tersebut. Kepala sekolah bersama komite sekolah berkewajiban menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) setiap tahun dengan memperhatikan langkah penyusunan sebagai berikut:

- a) Menginventarisir melalui diskusi tentang program kegiatan sekolah pada tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun pembangunan, yang realistis dan *feasible* yakni yang dapat dikerjakan dan dapat dibiayai. Program bukan daftar keinginan yang susah dilaksanakan atau bahkan sulit memperoleh dana untuk membiayai program itu. Karena program kegiatan sekolah adalah suatu kebutuhan yang dapat dilaksanakan dan mampu dalam pembiayaan.
- b) Menginventarisir sumber dana/pembiayaan yang memungkinkan diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan komponen-komponen peruntukannya, subsidi pemerintah kabupaten/kota. Demikian pula dimaksud masyarakat, orang tua peserta didik dan dari pemerintah (pusat dan atau daerah). Berdasarkan

²³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Cet 9, hlm, 198.

perkiraan sumber pembiayaan itu maka sudah dapat dilakukan analisis tentang program kegiatan yang memungkinkan.

- c) Langkah merumuskan dan menetapkan program kegiatan. Rumusan program kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan dari semua unsur yang terkait, seperti komite sekolah, dewan guru, dewan tata usaha bahkan dari pimpinan OSIS di sekolah yang bersangkutan. Keikutsertaan semua pihak yang terkait dalam proses penyusunan dan penetapan program kegiatan itu dimaksudkan selain untuk memperluas dan memperkaya sumber informasi, juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta semua komponen sekolah dalam pelaksanaan semua kegiatan sekolah.
- d) Menetapkan besarnya anggaran pada setiap sektor kegiatan serta sumber pembiayaannya.
- e) Melakukan analisis setiap butir program kegiatan didasarkan atas ketersediaan dan urgensi pada setiap satuan program kegiatan, dengan menyusun skala prioritas.
- f) Menetapkan satuan program yang definitif berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan tingkat urgensi satuan program itu.
- g) Mensosialisasikan program kegiatan itu dan sumber pembiayaan kepada seluruh komponen sekolah termasuk komite sekolah.
- h) Mengajukan kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan setempat.²⁴

Sedangkan E. Mulyasa mengutip pendapat dari Lipham, mengungkapkan bahwa kegiatan pokok penyusunan anggaran terdapat empat fase adalah sebagai berikut:

- a) *Perencanaan anggaran*: merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost effectiveness*,

²⁴ M. Nurdin Matry, *Op. Cit*, hlm, 175-176.

membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai tujuan.

- b) *Mempersiapkan anggaran*: antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia.
- c) *Mengelola pelaksanaan anggaran*; antara lain mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, dan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
- d) *Menilai pelaksanaan anggaran*: antara lain menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.²⁵

Sedangkan tujuan diadakannya keuangan dan pembiayaan sekolah sudah tercantum dalam Permendiknas No.19/2007 mengenai pengelolaan bidang keuangan dan pembiayaan, diharapkan dapat:

- a) Sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.
- b) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah mengatur:
 - (1) Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola;
 - (2) Penyusunan dan pencarian anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional;
 - (3) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
 - (4) Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah, serta institusi di atasnya.

²⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional, Op.Cit*, Cet 9, hlm, 199.

- c) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan oleh institusi di atasnya.
- d) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin terciptanya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.²⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat di kemukakan bahwa perencanaan sekolah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti:

- a) Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan yang luas tentang dinamika sosial masyarakat
- b) Tersedia informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan
- c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan
- d) Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.²⁷

Jadi penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam penyusunan anggaran perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari semua praktisi pendidikan dan pihak pengelola pendidikan, karena anggaran termasuk salah satu komponen manajemen pendidikan yang dapat menyukseskan tercapainya tujuan pendidikan. Jadi perlu melibatkan orang-orang yang profesionali untuk menyusun anggaran tersebut.

2) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS)

Proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut.

- a) Pada tingkat kelompok kerja

²⁶ M. Nurdin Matry, *Op.Cit*, hlm, 177.

²⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional, Op.Cit*, Cet 9, hlm. 200.

Kelompok kerja yang dibentuk sekolah, yang terdiri dari para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antara lain mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya di klasifikasikan, dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan.

Dari analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

b) Pada tingkat kerja sama dengan Komite Sekolah

Kerja sama antara komite sekolah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk di atas, dilakukan untuk rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS.

c) Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada kantor inspeksi pendidikan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.²⁸

Uraian di atas, untuk mengembangkan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) kerja tim dan transparansi anggaran terhadap semua pihak agar dilakukan. Karena mengingat pengembangan RAPBS agar lebih maksimal.

²⁸ *Ibid*, hlm. 200-201.

b. Implementasi/Pelaksanaan Keuangan Sekolah

Paling tidak ada tiga sumber pokok dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu: (1) *financing*, menyangkut dari mana sumber pembiayaan itu diperoleh, (2) *budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan (3) *accuntability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.²⁹

Dan tiga pokok tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun ketentuan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ada beberapa karakteristik yang identik.³⁰

Berdasarkan buku pedoman rencana, program dan penganggaran, sumber dana pendidikan yang dapat dikembangkan dalam anggaran belanja sekolah antara lain meliputi anggaran rutin (DIK); anggaran pembangunan (DIP); dana penunjang pendidikan (DPP); dana masyarakat, donatur, dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah,³¹ orang tua³² dan masyarakat.³³

²⁹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm, 122.

³⁰ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, *Op. Cit*, Cet 9, hlm, 201.

³¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, menjelaskan bahwa pada umumnya penerimaan dana dari pemerintah dibedakan menjadi dua yaitu: pemerintah umum dan pemerintah khusus. Yang termasuk dalam golongan pemerintah umum adalah semua penerimaan pemerintah dari pajak, pajak pendidikan dari perusahaan-perusahaan, dan iuran-iuran pembangunan daerah. Sedangkan yang dari pemerintah khusus pendidikan antara lain bantuan atau pinjaman luar negeri, seperti bantuan dari badan internasional PBB (UNICEP dan UNESCO), pinjaman dari bank dunia. Lebih lengkapnya baca: Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Op.Cit*, hlm, 136-137.

³² Termasuk dalam golongan ini adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau BP3 yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa pada setiap bulan yang disetorkan ke Kantor Dinas Pendidikan. *Ibid.*,

Penulis menambahkan, di samping pendanaan yang dari pemerintah, peserta didik, dan masyarakat maka dapat pula dana tersebut digali dari sumber-sumber yang mungkin dari pihak-pihak masyarakat dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

Sedangkan prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya menganut pola perpaduan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Dengan demikian pola manajemen keuangan sekolah terbatas pada pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan mengembangkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), maka sekolah memiliki Kewenangan dan kekuasaan yang cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan sekolah.³⁴

Kewenangan dan kekuasaan yang diberikan pemerintah kepada sekolah kadang justru malah menjadi beban terhadap sekolah. Pasalnya, sekolah harus memikirkan bagaimana lembaganya agar tetap hidup. Dan bagaimana sekolah mengatur dana yang telah didapatkan melalui bendahara. Pada umumnya di setiap sekolah telah ditetapkan bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya.

³³ Sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau keluarga, perusahaan, badan-badan sukarela dan kelompok-kelompok. Sumbangan perorangan atau keluarga siswa tidak hanya bentuk uang, tetapi juga tanah, tenaga dan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah. *Ibid.*, hlm,138.

³⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Op.Cit, Cet 9, hlm, 202.

Untuk uang yang harus dipertanggung jawabkan, ditunjuk bendahara oleh pihak yang berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar setelah mendapatkan perintah dari atasan langsung.

Sedang uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengan persetujuan musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yang berasal dari masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harus mendapat persetujuan dari komite sekolah.³⁵

Berkaitan dengan penerimaan atau penggalangan dana dari berbagai kalangan baik dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, dan para donasi maka penulis dapat menggaris bawahi, di sini menunjukkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam kerja sama untuk pengembangan serta memajukan pendidikan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sekolah harus lebih pintar merangkul masyarakat agar dapat kerja sama membangun pencapaian tujuan pendidikan. Lebih-lebih pada sekolah-sekolah swasta yang notabene tidak mendapatkan suplai dana penuh dari pemerintah. Dengan kata lain *mati hidupnya sekolah tergantung dari sekolah itu sendiri* jadi mau tidak mau sekolah harus bekerja sama dengan masyarakat.

2) Pengeluaran

Dimensi alokasi secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin yang sifatnya berulang (*recurrent expenditure*) atau aktiva lancar dan pengeluaran kapital/modal (*capital expenditure*) atau aktiva tetap. Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu (bulanan atau tahunan)

³⁵ *Ibid*, hlm, 203.

seperti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai, pembelian bahan-bahan ATK. Biaya pemeliharaan gedung, halaman sekolah, dan dana-dana operasional.³⁶

Hasbullah juga menegaskan atas pembagian penggunaan sumber dana sekolah menjadi dua, yaitu:

- a) Anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu: gaji, biaya operasional keseharian sekolah, dan
- b) Anggaran untuk pengembangan sekolah.³⁷

Dana yang dipergunakan dalam kegiatan rutin maupun dana pengembangan tersebut memerlukan pengelolaan yang baik, terutama bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta (swadana) atau tidak mendapatkan bantuan pemerintah.³⁸

Untuk mengelola anggaran yang tersedia maka harus disusun dengan baik pula. Jadi dalam penyusunan anggaran, alokasi penggunaan dana pendidikan, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan memerlukan suatu pengelolaan dan perhitungan yang cermat untuk penyelesaian tugas-tugas yang telah ditentukan atau diprogramkan.³⁹

Dalam penyelesaian tugas-tugas perlu pengorganisasian. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dalam bidang keuangan dimaksudkan untuk mengatur alokasi anggaran pada sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran. Pengaturan alokasi anggaran pada sasaran tertentu menjadi pedoman kerja bagi petugas bidang keuangan terutama bendahara sekolah yang bersangkutan.⁴⁰

³⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Op.Cit*, hlm, 138.

³⁷ Hasbullah, *Op. Cit*, hlm, 123.

³⁸ Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Op.Cit*, hlm, 139.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ M. Nurdin Matry, *Op. Cit*, hlm, 178.

Dengan mengorganisir anggaran dengan rapi, maka apa yang telah diprogramkan oleh sekolah dapat tercapai. Sesuai apa yang dikatakan oleh Ali Bin Abi Thalib,

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan kebatilan yang lebih diorganisir dengan rapi.⁴¹

Oleh karena itu semua hal tersebut harus digerakkan dan dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan. Fungsi penggerakan atau pelaksanaan dalam bidang keuangan dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap petugas keuangan agar dapat mengelola keuangan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai rencana dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam mengelola keuangan terhindar dari penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan, khususnya keuangan sekolah. Bimbingan pelaksanaan tugas dalam keuangan sekolah ini dilakukan oleh supervisor atau pejabat lainnya, terutama oleh Kepala Sekolah selaku atasan langsung bendaharawan. Kegiatan-kegiatan ini adalah dari aplikasi fungsi penggerakan/pelaksanaan.⁴²

M. Nurdi Matry menambahi, Pengelolaan keuangan di sekolah dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu:

- a) Pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan dengan baik berdasarkan kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelajaran.
- b) Pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan yang diatur oleh pejabat berwenang khususnya dalam bidang administrasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

⁴¹ Didin Nafidhuddin, dan Hendri Tanjung, *Op.Cit*, Cet 1, hlm, 100.

⁴² M. Nurdin Matry, *Op.Cit*, hlm, 178.

- c) Prinsip keterbukaan/transparansi dalam penggunaan keuangan sekolah perlu dilakukan, terutama dana yang bersumber dari masyarakat, komite sekolah dan dana dari pemerintah (khususnya bagi sekolah swasta).
- d) Kemampuan menyerap anggaran dimaksudkan semata-mata untuk membiayai program kegiatan (dipakai habis), bukan menghabiskan anggaran dengan tidak terarah atau dengan cara boros.
- e) Pembagian tugas yang jelas antara urusan umum yang tugasnya membeli barang dan jasa serta fungsi bendaharawan yang membayar barang dan jasa yang dipesan oleh urusan umum, sesuai faktur barang dan penagihan jasa. Hal ini berarti bendaharawan yang tidak bertugas membeli barang, sebaliknya urusan umum tidak berwenang melakukan pembayaran terhadap barang dan jasa.⁴³

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka penulis menyimpulkan, bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

E. Mulyasa menegaskan, bahwa pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau *input* dari proses sekolah seperti administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah

⁴³ Ibid, 179.

termasuk nilai setiap *input*, yang digunakan, sekalipun menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat.⁴⁴

Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggung jawaban pembukuan,⁴⁵ meliputi format buku kas harian, buku tebelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.⁴⁶

Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan anggaran belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta komite sekolah⁴⁷ di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.⁴⁸

Penulis menyimpulkan, bahwa untuk mengeluarkan dana/anggaran yang dimiliki oleh sekolah sebagai pemenuhan kebutuhan program yang telah direncanakan maka harus sesuai pola standar peraturan yang telah disepakati. Dan peran kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam pengawasan penyelenggaraan/penggunaan dana karena kepala sekolah

⁴⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional. Op.Cit*, hlm, 203.

⁴⁵ Tata cara pembukuan harus dikuasai benar oleh seorang bendaharawan. Dalam pasal 77 ayat (1) ICW yang dimaksud dengan bendahara adalah “*orang-orang dan badan-badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang, atau kertas-kertas berharga dan barang-barang didalam gudang atau tempat-tempat penyimpanan yang lain sebagai dimaksud dalam pasal 55 ICW dan selaku demikian diwajibkan memberi perhitungan (pertanggung jawaban) tentang hal pengurusannya kepada badan pemeriksa keuangan*”. Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Op.Cit*, hlm, 143.

⁴⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, . Op.Cit*, hlm, 49.

⁴⁷ Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: pada pasal 56 ayat (3) komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.. baca: Tim Redaksi Maarif Press, *Kompilasi Kebijakan Pendidikan Nasional*, (Semarang: PW LP Ma'arif NU Jawa Tengah, 2006), Cet 1, hlm, 19.

⁴⁸ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional. Op.Cit*, hlm, 204.

sebagai *top manager* di sekolah yang harus menyetir segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah terutama dalam pengelolaan keuangan sekolah.

c. Evaluasi dan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah

1) Evaluasi

Aplikasi fungsi pengawasan dalam bidang keuangan dilakukan secara rutin oleh atasan langsung bendaharawan yakni kepala sekolah dalam rangka *building control* atau pengawasan melekat. Selain itu, dilakukan pengawasan secara insidental dari aparat pengawasan dari departemen bersangkutan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil pengawasan ini bermanfaat untuk memperbaiki kinerja petugas dalam bidang keuangan.⁴⁹

Pelaksanaan fungsi penilaian dalam bidang keuangan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi pengawasan. Hasil pengawasan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan menjadi bahan utama dalam memberikan penilaian terhadap pengelolaan keuangan.⁵⁰

Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian pengelolaan keuangan, bila ditemukan penyimpangan maka petugas keuangan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat penyimpangannya. Sanksi itu bersifat teguran, sanksi administratif, termasuk penggantian dana, bahkan bisa merupakan sanksi pidana yang digolongkan dalam tindak pidana korupsi.⁵¹

Berkaitan dengan evaluasi tersebut, maka penulis menyimpulkan, bahwa pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Walaupun perencanaan yang baik telah ada, yang telah diatur dan digerakkan, belum tentu tujuan dapat tercapai, sehingga masih perlu ada pengawasan. Pada dasarnya pengawasan merupakan

⁴⁹ M. Nurdin Matry, *Op.Cit*, hlm, 179.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm, 180.

⁵¹ *Ibid.*,

usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Apakah pelaksanaannya telah tepat dan telah menduduki tempat yang tepat, apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan pola organisasi. Kalau terdapat kesalahan dan penyimpangan, maka segera diperbaiki. Oleh sebab itu setiap manajer (kepala sekolah) pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban melakukan pengawasan. Untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah dituntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi keuangan.

2) **Pertanggung jawaban**

Pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada:

- a) Kepala Dinas Pendidikan
- b) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
- c) Kantor Dinas Pendidikan

Pertanggung jawaban yang dikenal dengan uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketepatan waktu. Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk pertanggungjawabannya sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.⁵²

Jadi penulis menggaris bawahi segala proses yang berkaitan dengan keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Maka dalam pelaporan/pertanggungjawaban harus dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya.

⁵² E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional. Op.Cit*, hlm, 206.

5. Hal-Hal yang Mempengaruhi Keuangan

Pembiayaan pendidikan tidak pernah tetap akan tetapi selalu berkembang dari tahun ke tahun. M. Nurdin Matry menjelaskan, secara garis besar perubahan pembiayaan ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perkembangannya demokrasi pendidikan
- 2) Kebijakan pemerintah

Pemberian hak kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan secara gratis merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu memperhatikan dan mengembangkan bangsanya.

- 3) Tuntutan akan pendidikan

Kenaikan akan tuntutan pendidikan terjadi di mana-mana. Di dalam negeri tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan dan segi kualitas yaitu naiknya keinginan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

- 4) Adanya inflasi

Yang dimaksud dengan inflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi.

b. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor tersebut antara lain:

- 1) Tujuan pendidikan

Sebagai salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan ke arah kompetensi.

- 2) Pendekatan yang digunakan

Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya dibanding metode lain dan pendekatan secara individual.

3) Materi yang disajikan

Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakannya praktek bengkel menuntut lebih banyak biaya dibanding dengan materi pelajaran yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian teori.

4) Tingkat dan jenis pendidikan

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang mangkir, dll.

Kedua hal tersebut di atas berpengaruh terhadap biaya pendidikan yang biasanya dinyatakan *unit cost* (satuan terkecil pada biaya). Dan ketersediaan biaya yang memadai merupakan syarat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.⁵³

Dari beberapa penjelasan tersebut penulis mengidentifikasi, bahwa sekolah agar selalu memperhatikan perkembangan yang dapat mempengaruhi keuangan sekolah. Apa bila sekolah tidak bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi baik internal maupun eksternal maka sekolah akan menerima dampaknya. Lebih-lebih lembaga pendidikan swasta yang notabene tidak mendapatkan kucuran dana dari pemerintah, harus jauh sebelumnya sudah mempersiapkan strategi yang dapat menanggulangi perubahan-perubahan yang berdampak pada sekolah.

⁵³ M. Nurdin Matry, *Op.Cit*, hlm, 180-182.

6. Strategi Penggalan Dana

Mujamil Qomar merumuskan, bahwa pendidikan swasta agar tetap eksis dalam menggerakkan semua sumber-sumber keuangan agar mudah dikeluarkan untuk pembiayaan pendidikan harus mempunyai strategi khusus untuk menggali dana. Maka cara/strategi yang perlu ditempuh antara lain sebagai berikut:

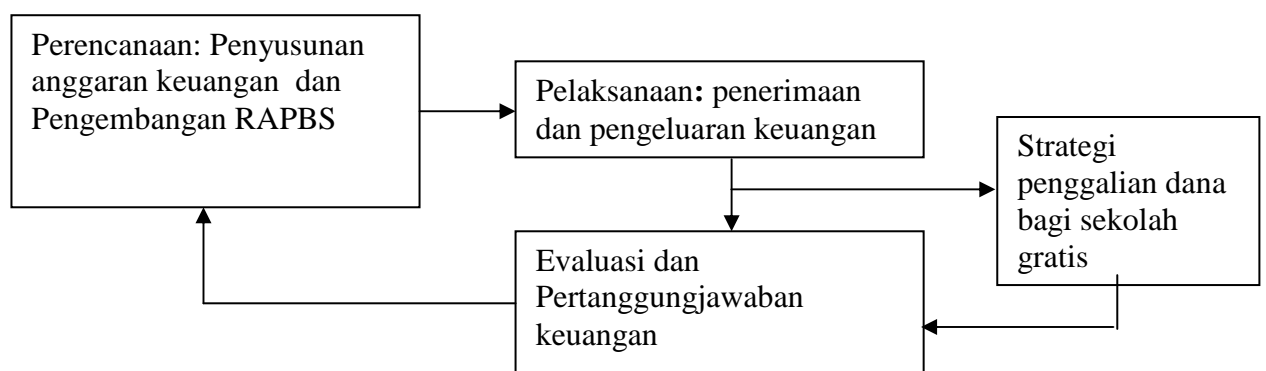
- a. Mengajukan proposal bantuan finansial ke Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Mengajukan proposal bantuan finansial ke Pemerintah Daerah.
- c. Mengedarkan surat permohonan bantuan kepada orang tua wali siswa.
- d. Mengundang alumni yang sukses untuk dimintai sumbangan.
- e. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha.
- f. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para donatur di luar negeri.
- g. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para kolega yang sukses secara ekonomis.
- h. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan finansial.
- i. Memberdayakan wakaf, hibah, infak, jariah, dan sebagainya.
- j. Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menagani lembaga pendidikan Islam untuk membantu dalam menyarikan dana.⁵⁴

Apabila dana atau uang itu telah didapatkan, manajer lembaga pendidikan Islam harus berusaha mengembangkannya melalui usaha-usaha produktif agar uang tersebut tidak mandek atau habis. Hal ini dilakukan agar dana bertambah besar meskipun sebagian telah digunakan untuk kepentingan lembaga. Usaha-usaha tersebut bisa diwujudkan dalam usaha mandiri secara otonom maupun bekerja sama dengan para pengusaha dengan pola bagi hasil. Jika membuka usaha secara mandiri, sebaiknya menyediakan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar,

⁵⁴ Mujamil Qomar, *Op.Cit*, hlm, 167-168.

bahkan kalau bisa kebutuhan rutin mereka. Dengan demikian, perputaran keuangan bisa bergerak dengan cepat. Baik usaha mandiri maupun kerja sama hendaknya diusahakan dengan ekstra hati-hati, penuh kesungguhan, keuletan, kecermatan, perhitungan yang presisi, serta pengontrolan secara ketat dan periodik.⁵⁵

Dari beberapa uraian di atas penulis menyimpulkan, bahwa sistem pengelolaan keuangan sekolah gratis adalah seperti gambar berikut:



⁵⁵ *Ibid.*,